

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya beragam destinasi wisata di Indonesia telah mendorong pertumbuhan investasi di sektor pariwisata dengan catatan tahun 2017 menunjukkan bahwa investasi di sektor pariwisata mengalami pertumbuhan hingga 31 persen. Sementara catatan dikuartir pertama tahun 2018 ini, pariwisata Indonesia telah mencapai USD 500 juta, yakni seperempat dari target yang ditetapkan yaitu sebesar USD 2 miliar (Dikutip dari m.liputan6.com, 10/2020, Pukul 13.30 WIB). Perkembangan destinasi wisata yang beragam serta sumbangan pariwisata akan pertumbuhan investasi yang semakin meningkat, dilihat pemerintah sebagai salah satu jalan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, serta sebagai upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan potensi di setiap masing-masing daerah. Peluang inilah yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan membuat perubahan paradigma pembangunan dari era sentralisasi menuju desentralisasi yang tertuang dalam konsep otonomi daerah. Dengan berlandaskan hukum pada UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah memberi konsekuensi pada masing-masing daerah wilayah untuk dapat menggali dan memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki sebagai penerimaan daerah yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat.

Kemunculan konsep otonomi daerah yang berasaskan desentralisasi mengubah pikiran masyarakat dan mendorong masyarakat lebih sadar dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing dengan salah satu caranya membangun dan mengembangkan potensi daerah sebagai suatu obyek pariwisata. Melalui pengembangan obyek wisata disuatu daerah, maka pengambilan langkah ini diharapkan dapat mencapai tujuan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi sumber daya alam yang sudah ada pada konsep otonomi daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian perekonomian daerah di suatu wilayah melalui pengembangan obyek wisata akan lebih mudah apabila wilayah tersebut sudah masuk dalam daftar daerah yang menjadi destinasi wisata.

Pariwisata merupakan salah satu penggerak pembangunan ekonomi di negara-negara industrial, negara kurang berkembang, hingga negara sedang berkembang, sebagai industri global, industri pariwisata memiliki untuk berkontribusi signifikan terhadap kegiatan ekonomi negara jika dikelola secara serius dan memperoleh dukungan pemerintah. Industri pariwisata dapat berkembang sebagai penghasil devisa negara serta penggerak utama pembangunan ekonomi. Tailan, China, Hawaii, Korea Selatan, dan Jepang merupakan negara-negara yang serius mendukung dan menggalakkan industri pariwisata sehingga patut dicontoh. Disamping keseriusan pihak swasta peran signifikan pemerintah sangatlah penting dalam memajukan industri pariwisata.

Robertson, kaen & moore (2006) menyatakan bahwa industri pertahanan dan pariwisata memberikan kontribusi yang sangat besar untuk mendatangkan pendapatan, memicu pertumbuhan ekonomi yang kuat, menciptakan lapangan kerja bagi orang dan tenaga kerja terdidik, memfasilitasi peluang perdagangan, membangkitkan nilai pengembangan ekspor yang besar, menarik penanaman modal asing dan mendatangkan devisa, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan stabilitas sosial. Pembangunan industri pariwisata hanya akan sukses bila dipimpin, didukung dan difasilitasi oleh pemerintah, dikemudikan oleh pihak swasta dan berbasis kemasyarakatan. Hal ini dapat disebabkan oleh peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulator dalam suatu negara sehingga dapat menggerakkan industri pariwisata. Faktor lain adalah karena kesuksesan pariwisata tergantung pada banyak faktor, seperti penyiapan infrastruktur yang baik, kemudahan transportasi, cakupan dan keberagaman jenis produk pariwisata, strategi pemasaran dan promosi yang penuh vitalistis, sistem informasi yang baik, pengelolaan destinasi wisata yang andal, harga yang kompetitif, dukungan lingkungan yang bersih dan sehat, your keselamatan, faktor kenyamanan yang tinggi dan lain-lain. Peran pemerintah dalam menyediakan semua faktor tersebut sangat besar. (Dr.Drs. soeseno bong, M.M. buku Manajemen resiko, krisis dan bencana untuk industri pariwisata yang berkelanjutan, PT Gramedia pustaka utama 2009: hal 7-8)

Perkembangan pariwisata terjadi karena adanya gerakan manusia di dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang

baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapat perjalanan baru (Robinson, 1976 dalam Murphy, 1985). Sebenarnya pariwisata sudah ada sejak beradaban manusia dengan adanya gerakan yang dilakukan manusia berupa ziarah ataupun perjalanan agama. Saat ini pariwisata sudah menjadi hal yang diperhatikan pemerintah karena pariwisata bisa menaikkan devisa negara, pariwisata juga cukup menjanjikan untuk mensejahterakan rakyatnya di setiap negara.

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, memiliki 17.508 pulau besar dan pulau kecil, luas wilayah darat 1,937 juta km², luas laut 5,8 juta km² dengan garis pantai terpanjang di dunia, (Suharto, 2009). Berdasarkan data tersebut maka Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara, karena Indonesia adalah negara yang terkenal akan sumber daya alamnya, Indonesia juga disebut negara kepulauan oleh sebab itu Indonesia memiliki banyak sekali tempat-tempat yang bagus untuk dijadikan objek wisata, contohnya wisata laut, wisata alam dan masih banyak lagi tempat yang bisa dijadikan objek wisata.

Pengembangan pariwisata pedesaan diakselerasi melalui program nasional pemberdayaan masyarakat pariwisata (PNPM mandiri pariwisata). PNPM mandiri pariwisata adalah PNPM mandiri rintasan atau penguatan. Sebagai rintasan PNPM mandiri pariwisata berfungsi sebagai pendukung kegiatan PNPM mandiri inti dengan fokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata pedesaan. Daerah pedesaan ditetapkan sebagai sasaran utama

pembangunan nasional karena karena merupakan tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia dan kondisi infrastruktur Ekonomi jauh tertinggal dibandingkan dengan perkotaan disana pula tempat penduduk miskin bermukim. Berhadapan dengan persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Pariwisata merupakan sektor penggerak ekonomi yang penting di daerah istimewa yogyakarta (DIY) terlihat dengan banyaknya objek wisata dan daya tarik wisata yang mampu menyerap pengunjung wisatawan, baik domestik maupun mancanegara pada tahun 2014 jumlah wisatawan mengalami kenaikan 19,17% dibandingkan pada tahun 2003 yakni dari 2.837.967 menjadi 3.346.180 wisatawan (kedaulatan rakyat, 2015) berbagai jenis pariwisata ditawarkan di DIY meliputi wisata budaya, wisata alam, wisata belanja, dan wisata MICE. keanekaragaman seni dan budaya yang didukung oleh kreativitas serta keramahaman masyarakat mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan di daerah Istimewa Yogyakarta. (ani wijayanti, buku : strategi pengembangan pariwisata edukasi di kota yogyakarta, CV BUDI UTAMA 2012 hal 1-2).

Daerah Istimewa Yogyakarta, disamping dikenal sebagai sebutan kota perjuangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan juga dikenal dengan kekayaan pesona alam dan budayanya yang membawa Yogyakarta memiliki sebutan Daerah Tujuan Wisata (DTW) terkemuka. Daerah Istimewa Yogyakarta yang relatif aman dan nyaman dengan keramahaman masyarakatnya, menjadikan Yogyakarta banyak diminati orang/wisatawan

untuk berkunjung. Tidak mengherankan bahwa jika setiap tahunnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) yang datang terus meningkat (www.visitingjogjacom, diakses pada tanggal 10 oktober 2020 pukul 16.00 wib).

Daerah Istiwa Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata sudah dikenal luas. provinsi ini merupakan salah satu destinasi pariwisata primer setelah jakarta, bali dan batam. hasil kuesioner tahunan dialog pasar wisata DIY kebeberapa kota se-jawa sejak tahun 2009 menunjukkan hasil bahwa *study tour* ke DIY merupakan pilihan utama para pengunjung diluar jakarta dan bali (kedaulatan rakyat, 2012).

Potensi pariwisata membutuhkan pengelolaan yan tepat sebagai upaya mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. pengelolaan destinasi pariwisata berperanan kunci dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata. saat ini destinasi pariwisata menghadapi tantangan kompleks, mulai dari koordinasi lintas sektor, peningkatan daya tarik, penanganan mutu lingkungan, sampai perbaikan citra. model pengelolaan pariwisata harus mampu mengatasi tantangan tersebut secara tepat sehinmemberikan kontribusi positif terhadap seluruh kompnennya, pengelolaan destinasi pariwisata harus memahami kebutuhan dan motipasi wisatawan sehingga dapat menentukan metode dapat metode pengelolaan yang tepat dan menghindari penurunan kualitas destinasi pariwisata (Howie, 2003 dalam Ani Wijayanti).

Kabupaten Bantul memiliki banyak sekali potensi yang sudah berkembang maupun yang baru dikembangkan. Bantul juga memiliki program-program pengembangan objek wisata alam, budaya dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk dapat mendidik masyarakat agar bisa mengelola pariwisata yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing dilain sisi juga dengan keberadaan pariwisata dalam dapat menanggulangi kemiskinan di desa-desa dan pelosok negeri, dengan keluarnya beberapa peraturan yang mengatur soal pariwisata membuat desa khususnya dapat mengelola dan memberdayakan masyarakat untuk membangun pariwisata di daerah-daerah.

Desa Bawuran memiliki banyak sekali sumber daya alam bagus untuk dikembangkan dan yang saat ini sudah dimiliki adalah wisata Puncak Gebang dan Puncak Sosok, Desa Bawuran memiliki potensi pariwisata alam yang sangat besar dimana 65% perbukitan, tandus dan hanya bisa ditanami tanaman keras kemudian lebih banyak pematuan, tanahnya sangat tipis sekali, sehingga potensi perbukitan seperti itu yang selama ini kurang produktif bagaimana desa bersama masyarakat memikirkan untuk menjadikan nilai yang lebih dari perbukitan, mereka punya bukit kalau ditanami itu kurang produktif hasilnya sehingga mereka mereka melihat sisi yang lain ternyata ada potensi yang bisa dikembangkan, kemudian bersama pemuda, masyarakat dan desa. awalnya dimulai dari pemuda walaupun dalam RPJMD menjadikan target desa bawuran menjadi desa wisata alam. meski memiliki potensi yang begitu banyak namun semua itu belum dikelola secara profesional oleh warga masyarakat dan desa bawuran sebab kesadaran dari masyarakat masih sangatlah minim,

kemampuan dalam mengelola potensi sumber daya alamnya juga belum baik. itu disebabkan karena sumber daya manusia masih banyak yang kurang dalam segi ilmu pengetahuan dan pendidikan. maka penulis menarik untuk meneliti Desa Wisata yang ada di Desa Bawuran Kabupaten Bantul. Berdasarkan Penjelasan di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pariwisata.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata (Desa Bawuran Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul)

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah penelitian tersebut di atas maka adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata (Desa Bawuran Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul)

D. Mafaaf Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat antarlain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan dalam pengembangan Ilmu

Pemerintahan yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintah Desa dalam pengembangan wisata

2. Manfaat akademis, mengetahui dan memberikan suatu gambaran mengenai Tata Kelola Pemerintah Desa dalam pengembangan wisata. Selain itu hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian sejenis.

E. Tinjauan Pustaka

Di dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini peneliti mempelajari informasi dari hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan dan kekurangan yang sudah ada. Peneliti juga menggali informasi dari jurnal ilmiah dan skripsi dalam rangka mendapatkan sebuah informasi yang sudah telah ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori yang ilmiah.

1. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh sodara Rumsari Hadi Sumarto, Lukas Dwiantara dan Asmi Desanti yang berjudul : Pemberdayaan Masyarakat dalam Tata kelola Pariwisata Di kampung wisata Dewo Bronto Yogyakarta. Jurnal Publicuho, Volume 2 Number 4 (November-January,(2019) pp 111-127.

Penelitian ini sangatlah penting bagi pemerintahan Desa agar dapat membantu masyarakat Desa sebelum pembangunan Desa dilakukan. dalam hal ini agar pembangunan Desa tidak dijalankan berdasarkan keterpaksaan karena menerima dana Desa, tetapi berdasarkan kesadaran untuk menjadikan desa mandiri.

Selain dari pada itu, penting bagi Desa unentuk mendelegasikan pegawainya untuk melanjutkan studi, juga senantiasa membangun kerjasama atau sinergi kepada level pemerintah yang lebih tinggi di atasnya seperti (kecamatan dan provinsi) juga dengan lembaga universitas dan antara Desa itu sendiri dalam upaya berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menopang pemerintahan Desa untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan dan praktek tata kelola desa. dalam rangkai peningkatan kinerja desa, maka budaya gotong-royong harus senantiasa dilakukan dengan kesadaran kemajuan yang sama.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh sodara Heri Setiawan. Fakultas ilmu politik dan Ilmu Sosisl (UMY) , yang berjudul : Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam upaya mewujudkan desa wisata alam yang maju (desa plajan, kecamatan pakis Aji , Kabupaten Jepara 2018)

Hasil penelitian ini adalah Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam upaya mewujudkan desa wisata alam yang maju desa plajan, kecamatan pakis Aji , Kabupaten Jepara 2018 yaitu : Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Supermasi Hukum, Preoritas Politik sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, memperhatikan yang paling lemah dalam pengambilan keputusan.

3. Hasil penelitian dilakukan oleh sodara Dedi Muhtra Adh Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial (UMY) dengan judul : Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Dana Desa Tahun 2015 (Desa Banyuraden, kec. gamping, Kabupaten Sleman, DIY

4. Dirjen Pemebangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , Kementerian Desa Pemebangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, 2018, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemuktahiran Status Perkembangan Desa Indek desa Membangun IDM Jakarta Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variable diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 - 1
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan,(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan lemabara negara nomor 4966). Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, inpres tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata, (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan lemabara negara nomor 5495). Peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata Republik Indonesia nomor PM.04/PM.001 /MKP/2008 tentang sadar wisata (POKDARWIS) Inpres Nomor 16 Tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang tata cara pengerahan urusan kabupaten/kota kepada desa. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 tahun 2015 tentang induk pembangunan pariwisata daerah (RIPARDI) tahun 2015-2025 kabupaten Bantul. keputusan kepala dinas pariwisata kabupaten Bantul Nomor 921/SK/ 2019 Tentang Penguohan Kelompok Sadar

wisata,(POKDARWI) Jabal Kelor puncak sosok, Desa Bawuran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Keputusan Lurah Bawuran Nomor 36 tahun 2017 tentang pembentukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Jabal Kelor/puncak sosok, Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Hak asal usul “ dan “Kewenangan lokal skala desa’ yang termaktub dalam pasal 19 huruf a dan b Undang – Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, kedua hak tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan pelaksana UU Desa , yaitu di Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Tata kelola Pemerintah Desa

Pemerintah atau “Government” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “*The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc*” (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang – orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya (Rowland Bismark Fernando : 2020)

Governance adalah tata pemerintahan/kegiatan pemerintah, bukan institusi pemerintahanya. *Good governance* artinya tata pemerintahan yang baik, yaitu tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi

masyarakat, bersikap egaliter, dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku dan budaya lokal. *Good governance* berhubungan dengan pelayanan prima, yaitu hubungan proses dan *output*. Jika proses kegiatan pemerintahan didasarkan atas prinsip – prinsip *good governance*, maka dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, *good governance* dan pelayanan prima merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Hanif Nurcholis, teori dan praktik pemerintahan dan Otonomi Daerah, (jakarta: Grasindo, 2005: Hal 300)

Menurut UNDP (United Nations Development Program), karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan *good governance* meliputi: (. (Hanif Nurcholis, teori dan praktik pemerintahan dan Otonomi Daerah, (jakarta: Grasindo, 2005) Hal 300-301)

- a. Partisipasi yaitu setiap warga negara diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik/kebijakan publik;
- b. Aturan hukum yaitu pemerintah menjamin tegaknya hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia;
- c. Transparansi yaitu semua kebijakan publik harus transparan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun evaluasi evaluasinya. Arus informasi tidak boleh terhalang;
- d. Daya tanggap yaitu semua lembaga pemerintahan harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan stakeholder (pihak yang berkepentingan);

- e. Berorientasi Konsensus yaitu kebijakan yang diambil didasarkan pada pilihan-pilihan yang terbaik, berdasarkan kesepakatan semua unsur masyarakat;
- f. Berkeadilan yaitu adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- g. Efektif dan efisien yaitu proses-proses dan kegiatan – kegiatan lembaga harus menghasilkan *output* yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang digariskan, dan menggunakan sumber daya sebaik mungkin;
- h. Akuntabilitas yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, lembaga swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga – lembaga *stakeholder*;
- i. Visi strategis yaitu para pemimpin dan publik memiliki visi strategis jauh kedepan, membangun masa depan yang lebih baik berdasarkan nilai- dan menyejahterakan.

Dari karakteristik yang dikemukakan oleh UNDP tersebut, (Sedarmayanti: 2004: hal 7) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

- a. **Akuntabilitas:** Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

- b. **Transparansi:** Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- c. **Keterbukaan:** Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
- d. **Aturan hukum:** Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Menurut Shohibuddin, mohammad (2016:8-9) UU Desa telah kerangka normatif dan institional bagi pelaksanaan demokrasi desa, yang mencakup aspek kepemimpinan, akuntabilitas, representasi dan partisipasi. UU Desa juga memperkuat demokrasi perwakilan dan permusyawaratan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Musyawarah Desa, BPD disini tidak lagi sebagai penyelenggara pemerintah desa tetapi digantikan dengan peran penguatan politik lainnya yakni menjalankan tugas legislasi (Pasal 55 butir a) Representasi (Pasal 55 butir b), kontrol (Pasal 55 butir c) dan delibrasi (Pasal 1 ayat 5) dan lembaga desa lainnya, yang ditetapkan oleh UU Desa sebagai pelembgaan forum delibratif untuk mneyalurkan aspirasi, kepentingan dan kontrol warga desa adalah Musyawarah Desa (MD), menurut pasal 54 ayat 1 “ Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal

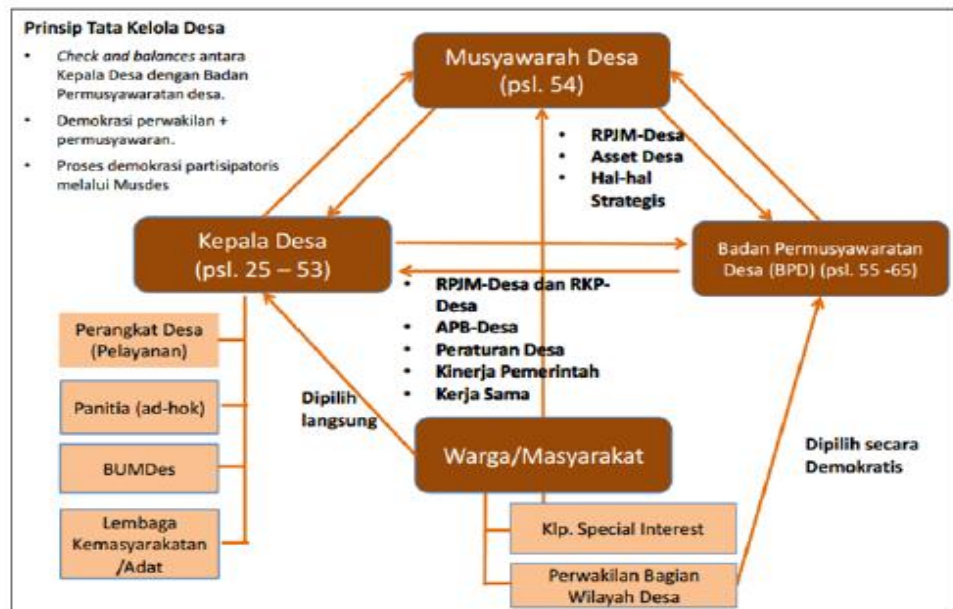
yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. dan sesuatu yang bersifat strategis tersebut meliputi (Pasal 54 ayat 2).

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Berikut adalah skematis, hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Grafik 1.1

Hubungan Kelembagaan dalam Pemerintahan Desa



Sumber Zakaria 2014 (Dalam Shohibuddin, 2015) hal 10

2. Pemberdayaan Masyarakat

Definisi Pemberdayaan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Pasal 73 ayat 1 Permendes 17/2019), Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilakukan dilakukan dengan (pasal 85 ayat 2, Permendes 17/2019)

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. Mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Desa secara Berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;

- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, kelompok marginal, dan kelompok masyarakat rentan lainnya;
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;
- f. Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa;
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. Melakukan Pendampingan Masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan.
- j. Melakuakn pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Menurut Ambar Teguh S.(2004:78), dari segi eptimologinya, Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti tenaga, upaya, kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. sedangkan dalam bahasa Inggris, pemberdayaan berasal dari kata “*empower*” yang menurut Merriam Webster, sedangkan menurut Oxford English Dictionary, Pemberdayaan mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah *to give power or authority to/* memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan pengertian yang kedua yaitu

to give ability to or enable/ upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.”

Ambar Teguh S (2004: 80) menyebut bahwa tujuan pemberdayaan yaitu:

“ Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.”

Kartasasmita G (1996: 23) mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.

- b. Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
- c. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaannya dalam menghadapi yang kuat (Kartasmita)

Sedangkan menurut Sulistiyani A.T, (2004:83-84) menyatakan bahwa proses Pemberdayaan meliputi.

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

3. Pariwisata

Menurut Undang – Undang No 10 tahun 2009, definisi Pariwisata adalah “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. pariwisata adalah keseluruhan kegiatan

peamarintah dunis usshs dsn masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Menurut (Karyono, 1997: 15)pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak secara perorangan maupun kelompok didalam wilayah negara lain” Sedangkan menurut Yoeti (1996: 118) dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Pariwisata*, bahwa pariwisata adalah Suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat yang lain dengan maksud bukan untuk berusaha (bussines) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menurut Wardiyanta (2006 : 49-50) Pariwisata dapat ditinjau dari dua aspek, pertama aspek kelembagaan, yaitu Pariwisata merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan rekreatifnya dan dari aspek Subtantifnya, pariwisata merupakan bagian dari budaya masyarakat yang baekaitan dengan cara penggunaan waktu senggang yang dimiliki.

Adapun jenis-jenis pariwisata menurut Nyoman S. Pendit (2003)

- a. Wisata Budaya Seorang melakukan perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dana dapat istiadat mereka, budayadan seni

mereka. Sering perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan kegiatan budaya.

- b. Wisata Kesehatan Hal ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat tinggalnya sehingga bisa mengobati kelelahan-kelelahan jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mandi di sumber air panas atau tempat menyediakan fasilitas- fasilitas kesehatan lainnya.
- c. Wisata Olah Raga Ini dimaksudkan dengan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara, seperti Asia Games, Olimpiade, Thomas Cup, Uber Cup dan lain-lain.
- d. Wisata Komersial Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersil seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya. Tidak jarang pameran atau pekan raya ini dimeriahkan dengan berbagai macam atraksi dan pertunjukan kesenian.
- e. Wisata Industri Wisata industri adalah perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang kesuatu kompleks satu daerah perindustrian dimana pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar, dengan tujuan dan maksud untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

- f. **Wisata Politik** Wisata politik adalah perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam pariwisata kegiatan politik, misalnya ulang tahun perayaan 17 Agustus di Jakarta, Penobatan Ratu Inggris di London, dan sebagainya.
- g. **Wisata Konvensi** Berbagai negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya.
- h. **Wisata Sosial** Wisata sosial adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan misalnya buruh, petani, atau mahasiswa.
- i. **Wisata Pertanian** Wisata pertanian adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk studi atau sekedar melihat-lihat sekelilingnya sambil menikmati segarnya tanaman beanekaragam dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur mayur dan palawija disekitar perkebunan yang di kunjungi.
- j. **Wisata Maritim atau Bahari** Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, seperti di danau, pantai, atau memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan

mendayung, berkeliling melihat taman laut dengan pemandangan yang indah dari permukaan air, serta berbagai rekreasi perairan.

- k. Wisata Cagar Alam Jenis wisata ini banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan wisata dengan jalan mengatur wisata ketempat cagaralam atau hutan lindung.
- l. Wisata Buru Jenis wisata ini banyak dilakukan dinegeri yang memiliki daerah atau tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah yang digalakan oleh agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan,.
- m. Wisata Pilgrim Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat-istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat yang dilakukan baik perorangan maupun rombongan yang berkunjung ketempat suci, kemakam- makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, kebukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda. Wisata Pilgrim ini banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman danti dakjarang pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan melimpah. Ditanah air kita banyak tempat suci atau keramat yang dikunjungi oleh umat- umat beragama tertentu ,misalnya seperti Candi Borobudur, Prambanan, Pura Besakih di Bali, Sendangsono di Jawa Tengah, makam Wali Songo, dan sebagainya.

- n. **Wisata Bulan Madu** Wisata bulan madu adalah perjalanan yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru yang diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan dengan fasilitas yang istimewa atau khusus yang sedang berbulan madu dengan fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka, seperti kamar pengantin dihotel yang khusus disediakan dengan peralatan yang serba istimewa.
- o. **Wisata Petualangan** Wisata petualangan adalah jenis wisata yang melakukan kegiatan wisata seperti masuk hutan belantara yang tadinya belum pernah dijelajah, mendaki tebing yang terjal, terjun kedalam sungai yang curam, arung jeram menyusuri goa dan susur pantai.

Desa wisata adalah desa yang menunjukkan tema produk pariwisata yang diutamakannya. Tema ini serupa dengan pilihan tema lain seperti desa industri, desa kerajinan, desa kreatif, dan desa gerabah. Sedangkan wisata desa adalah kegiatan wisata yang mengambil pilihan lokasi di desa, dan jenis kegiatannya tidak harus berbasis pada sumber daya perdesaan. (Simanungkalit, victoria br dan anna sari,desty(panduan pembangunan desa wisata hijau, hal:20).

Berdasarkan tingkat perkembangannya, desa wisata dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. **Desa Wisata Embrio:** desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat/desa untuk mengelolanya menjadi desa wisata;

2. **Desa Wisata Berkembang:** desa wisata embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah mulai melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung; dan
3. **Desa Wisata Maju:** desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola, seperti Koperasi/ Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), selanjutnya disebut BUMdes, serta sudah mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik.

Untuk dapat dikategorikan sebagai desa wisata harus memenuhi beberapa syarat utama sebagai berikut:

- a. Memiliki persyaratan sebagai sebuah destinasi pariwisata sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 2009;
- b. Kegiatan pariwisata berbasis pada sumber daya perdesaan;
- c. Kegiatan melibatkan partisipasi aktif wisatawan dalam kehidupan perdesaan;
- d. Lebih berorientasi pada kegiatan rekreasi luar ruang (*outdoor recreation*);
- e. Sebesar-besarnya mendayagunakan sumber daya manusia lokal;
- f. Memberikan penghargaan besar pada budaya dan kearifan lokal;
- g. Menyediakan akses yang memadai baik akses menuju ke destinasi lain maupun internal di dalam desa wisata itu sendiri; dan

h. Memiliki komunitas yang peduli pada pariwisata.

Menurut Suwanto Gamal (1996: hal:70) unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata meliputi :

a. Obyek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada:

1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
3. Adanya spesifikasi/ciri khusus yang bersifat langka.
4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan;
5. Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain-lain).
6. Obyek wisata budaya dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

b. Prasarana Wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam

perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

c. **Sarana Wisata**

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

G. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan bahasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. juga untuk mempermudah peneliti dalam menafsirkan banyak teori di dalam penelitian, maka ketentu definisi konseptual terkait yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintah Desa

Tata Kelola Pemerintahan Desa adalah sistem Pemerintahan Good Governence supaya potensi atau sumber daya alam yang ada di desa dapat dikelola dengan baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memperbaiki kualitas hidup. (M, Aagun Akbar, Skep, Ners, Penerbit CV budi utama, Hal: 35)

2. Pemberdayaan Masyarakat

Ambar Teguh S (2004: 80) menyebut bahwa tujuan pemberdayaan yaitu: Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

3. Pariwisata

Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari satu tempat ketempat yang lain melinggalikan tempat yang semula dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafka ditempat yang dikunjungi, tapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Marpaung, 2002).

H. Definisi Operasional

1. Tata Kelola Pemerintah Desa

- a. Akuntabilitas
- b. Transparansi
- c. Aturan Hukum

2. Pemberdayaan Masyarakat

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

3. Pariwisata

- a. Obyek dan Daya Tarik Wisata
- b. Prasarana Wisata
- c. Sarana wisata

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini Menggunakan metode penelitian kualitatif, karena dengan metode penelitian kualitatif nantinya akan mampu menganalisis gejala-gejala dan masalah yang ada. Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. (Prastowo,2012) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada kondisi yang alamiah tanpa ada pengujian hipotesis,hasil penelitian dengan metode alamiah diharapkan bukan generalisasi berdasar ukuran kuantitas, namun makna dari fenomena yang diamati.

Penelitian deskriptif menurut Nazir, Muhammad (1999:63) yaitu: “Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, obyek, kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

penelitian dalam bahasa inggris disebut dengan *research* jika dilihat dari susun katanya, terdiri dari suku kata yaitu *re* yang berarti melakukan kemabli atau pengulangan dan *research* dapat diartikan sebagai rangkaian kejadian yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks,

lebih detail, dan lebih komprehensif dari suatu yang diteliti.(Albi Anggito dan Johan Setiawan(Metode Penelitian Kualitatif, CV Jarak 2018 hal 7)

Menurut (Haryono, 2012). Metode Penilitan merupakan suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Menurut Denzin & Lincoln (1994) Menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud penafsiran fenomenayang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson (1968) Menyatakan bahwa penelitian kualitatif usaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Menurut kirk & Miller (1986: 9) mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang cecara fundamental beruntung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Dari beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud penafsiran fenomena yang terjadi dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan) analisi data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

makna dari generalisa. .(Albi Anggito dan Johan Setiawan(Metode Penelitian Kualitatif, CV Jarak 2018 hal 7-8)

Menurut Satori dan Komariah dalam buku metodologi penelitian kualitatif (2011) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat secara rinci dalam suatu bentuk narasi. Selain itu, Satori dan Komariah (2011: 219) juga memaparkan bahwa : “Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya dan lain sebagainya”. Pendapat peneliti tentang penelitian deskriptif kualitatif akan dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Jenis penelitian kualitatif lebih kepada penelitian mendalam dan akurat serta hasil dari penelitian akan lebih banyak berupa uraian deskriptif serta analisis sehingga pertanyaan dalam penelitian dapat terjawab.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Bawuran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan Pemilihan lokasi ini karena

peneliti tertarik untuk menganalisis kebijakan atau pelaksanaan tata kelola Pemerintahan desa dalam Pemberdayaan.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Sugioyo (2012: 137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer merupakan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan pengertian diatas khususnya pemerintahan Desa mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan, data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara langsung kepada informasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa
- 2) Direktur BUMdes
- 3) Ketua Pengelolah
- 4) Pengawai desa
- 5) warga masyarakat

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012) data sekunder, “merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen”

4. Unit Analisis

Sejalan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka unit analisis yang menjadi pokok penelitian adalah Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pariwisata.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi, secara singkat teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Selain melakukan wawancara secara langsung kepada informan, untuk memperoleh data tambahan serta mencocokkan data yang ada, maka peneliti melakukan observasi Observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek wisata ini dapat digunakan karena objek wisata yang diteliti merupakan program yang sedang berjalan, maka peneliti dapat memperoleh informasi tambahan dengan melihat atau merasakan langsung pelaksanaannya

b. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data utama, teknik yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau informan. Wawancara dilakukan dengan cara mendalam guna mendapatkan informasi terkait peran Pemerintah Desa

Bawuran dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan wisata.

Tabel 1.1
Daftar NaraSumber Peneliti

No	Nama	Jabatan
1	Hermawan	Kepala Desa/Lura
2	Humam Nahari	Ketua Bumdes
3	Rudi Haryanto	Ketua Pengelolah Desa Wisata (pokdarwis)
4	Suhadi	Masyarakat, Jambon, rt 01
5	Purwandi	Masyarakat, Jambon, rt 02
6	Tiwi	Masyarakat, Jambo, rt 04
7	Suyanto	Masyrakat, jambon, rt 04
8	Slamat Suharmanto	Masyarakat, jambon, rt 04
9	Dwi Astari	Masyarakat, jambon rt, 01
10	Sukardi	Masyarakat, jambon, rt 03
11	Rino Riharjo	Masyarakat, jambon, 04

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mencari data tentang hal atau variabel yang berupa catatan, majalah, agenda dan lain sebagainya. Penggunaan metode dokumentasi ini ditujukan untuk melengkapi dan memperkuat data dari hasil wawancara, sehingga diharapkan dapat diperoleh data yang lengkap, menyeluruh dan memuaskan. Metode ini

digunakan untuk memperoleh data tentang program dan strategi pengembangan pariwisata dan data-data lain yang terkait.

6. Teknik Pengolahan Data

Melalui data yang diperoleh dari lapangan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data. Teknik dalam pengolahan data tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya :

a. Editing

Teknik pengolahan ini digunakan untuk meneliti kembali data yang diperoleh di lapangan baik yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi guna menghindari kekeliruan dan kesalahan serta memilih mana saja informasi yang akan digunakan dan mana saja yang tidak perlu digunakan.

b. Interpretasi

Teknik pengolahan ini memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari makna dari informasi wawancara pada informan dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain. Adapun proses interpretasi atas hasil dari penelitian ini yaitu peneliti mencoba mengartikan, mencari inti pokok, atau maksud dari informan yang ada baik dari hasil wawancara maupun dokumen yang diperoleh

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono 2010:91). Untuk menganalisis data dilapangan

peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verivication.

Menurut Mile dan Huberman yang dikutip oleh (2006: 20-24) menyebutkan bahwa ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data terkait hal-hal penting dan pokok.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “the most frekuent from of Display data for qualitative research data in the past has been narrative tex” yaitu yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif (Sugiyono 2010).

Terkait dengan penelitian ini, proses penyajian data bisa dilakukan berdasarkan data telah terkumpul dari informan yang sudah peneliti tetapkan dalam penentuan informan berikutnya. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya kemudian peneliti menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Penyajian data

dilakukan dalam bentuk teks naratif dan tabel yang disajikan dengan sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Nazir M. (1999) adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis mendalam pada hasil penelitian. Dengan melakukan verifikasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran serta mencocokkan informasi yang ada dari keterangan informan untuk kemudian diperoleh data yang valid dan jelas.

d. Triangulasi Data

Triangulasi data dilakukan untuk menguji kebenaran dan keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang mana dilakukan dengan cara mencocokkan data yang didapat melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informasi yang didapat melalui wawancara berupa keterangan pihak pengelola Obyek Wisata Desa, Pemerintah Desa Bawuran serta Masyarakat Desa Bawuran. Melalui triangulasi data maka akan dapat diperoleh informasi yang valid dan jelas.